

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.A Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Malang: Selaras, 2013.
- AP. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum, Edisi Lengkap*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
- Moenta A. Pangerang dan PraPokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Depok: Raja Grafindo Pedana A. Syafa'at, rsada, 2018.
- Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Tanah Pejabat Pembuat Akta Tanah* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Sudargo Gautama, *Negara Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1973.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 640-1884 tanggal 31 Juli 2003.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

C. Media Internet

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4282>, Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2003, diakses tanggal 26 September 2019, Pukul 14.05

D. WAWANCARA

Haerudin, SH, Wawancara Kasubsi Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Nasional Kota Kendari, Pada Tanggal 29 Januari 2020.

Hj. Husnia, Wawancara Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 10 Februari 2020

Hj. Samsan B. Kadir SE, Wawancara Staf Bidang Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 18 Februari 2020.

Ibrahim Tane, SH.MH, Wawancara Advokat dan Kuasa Hukum Penggugat perkara Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Adl, pada tanggal 19 Januari 2020

Sudarmato, SH, Wawancara Kasubak Bantuan Hukum Biro Hukum Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 18 Desember 2019

Sudirman, SH.M.Kn, Wawancara Notaris dan Ketua Ikatan notaris Indonesia (INI) Kota Kendari, pada tanggal 19 Desember 2019

Widya Arung Raya, SH. M.Kn, Wawancara Notaris dan Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi Sulawesi Tenggara, Pada Tanggal 8 Februari 2020